



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 74 TAHUN 2023
T E N T A N G
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi Pemerintah perlu dilakukan penanganan resiko secara cepat dengan melakukan penilaian risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kota Tomohon telah melaksanakan penilaian risiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Resiko dan Hasil Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021 tentang Rencana Startegi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 161/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan hasil penilaian risiko dan kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal
 - b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam Penilaian Risiko
 - c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas.
 - d. Identifikasi Risiko
 - e. Peta risiko
 - f. Evaluasi Risiko/Indikator Risiko
 - g. Kegiatan Pengendalian/Rencana Aksi Pengendalian Risiko
- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam melakukan kegiatan Pengendalian Level Aktivitas;
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali disetiap tahun;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Tomohon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada Tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM,

HARRYATO Y. S. LASUT



NOVIE T. RUNTUKAHU

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR 74 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN RISIKO
DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON 2023

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
I	EKSTERNAL				
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19	Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor	Terjadi kerusakan ekonomi seperti guncangan fiskal jangka pendek dan guncangan negatif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi	
	• Lingkungan	Bencana alam (gempa bumi)	Gempa bumi jenis menengah yang sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe akibat adanya aktivitas subdiksi Lempeng Filipina	kerusakan sebagian infrastruktur yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe baik itu jalan maupun bangunan/rumah.	

	• Keuangan	Anggaran Pemilu/Pemilihan	Realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19	Terdapat program/kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal/tidak mencapai target yang ditetapkan	
		MOU Dana Hibah	Sering terjadi penundaan penandatanganan MOU	kegiatan telah dimulai tetapi anggaran belum diturunkan	adanya penegasan dari Mendagri ke Pemerintah Daerah setempat mengenai MOU Dana Hibah
	• IT & Infrastruktur	Distribusi air PDAM	Distribusi air PDAM untuk wilayah perkantoran sering tidak lancar	Tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk setiap Kantor	
II	INTERNAL				
	• Strategik	Kebijakan dalam pengambilan keputusan	Memahami tujuan	Hasil yang dicapai	
	• Personil	Kekurangan SDM	Kurang maksimalnya pelaksanaan pada setiap kegiatan	Pelaksanaan tahapan tidak maksimal	Membutuhkan penambahan SDM
		Tidak ada sertifikat PBJ	Tidak memahami proses pengadaan PBJ	Pelaksanaan PBJ ketergantungan dari pihak external	Peningkatan pelaksanaan pelatihan PBJ
		SDM tidak memahami IT	Satu orang personil mengoperasikan lebih dari satu aplikasi	Proses pengoperasian aplikasi lambat	Perlu adanya pelatihan pengoperasian IT
	• Proses	Rekrutmen Relawan DP3	Tidak tersedianya anggaran	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi relawan	


	• IT dan Infrastruktur	Kurangnya fasilitas penyedia jaringan internet	Terjadi gangguan jaringan internet	Pekerjaan yang membutuhkan koneksi jaringan internet tidak maksimal	
	• Keuangan	Pelaksanaan Pengambilan GUP (Ganti Uang Persediaan	Pengajuan berkas GUP melalui aplikasi belum tepat waktu	belanja kebutuhan perkantoran terkendala	Perlu meningkatkan pembinaan/p elatihan perbendahara an
		Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan	Menjadi temuan tim pemeriksa	
	• Informasi	Belum terintegrasiny a pengelolaan informasi	Publikasi informasi tidak merata	Informasi yang diperoleh tidak <i>up to date</i>	

Ditetapkan di Tomohon
Pada Tanggal 13 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM,


NOVIE T. RUNTUKAHU

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RISIKO DAN
HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2023

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansia l	Kerusakan Lingkunga n	Keselamata n Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugia n financial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Menggang gu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugia n financial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (sanksi peringatan)
3	Sedang	Menggang gu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugia n financial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penangana n medis	Dampak hukum sedang (peringata n keras/pida na ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugia n financial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (pemberhe ntian dari jabatan/PS U/kurunga n badan)

5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian financial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/Katastrofik	Kematian	Dampak hukum sangat besar (pemberhentian tetap/anca man pidana lebih dari 5 tahun)
---	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	----------	--

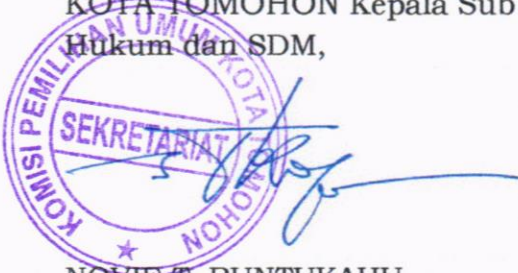
Ditetapkan di Tomohon
 Pada Tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
 Hukum dan SDM,



NOVIE T. RUNTUKAHU

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RISIKO DAN
HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2023

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
I. Program Dukungan Manajemen				
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Tomohon yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Adanya refocusing anggaran seluruh Satker untuk percepatan penanganan Covid-19 sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Hasil monitoring dan evaluasi belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya
			Persentase target kinerja KPU Kota Tomohon tercapai sesuai dengan perjanjian kerja	Beberapa target kinerja tidak tercapai dengan adanya refocusing anggaran
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Tomohon	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	Pimpinan dan pegawai belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta belum memiliki pola pikir yang melayani masyarakat atau stakeholder dan pencapaian kinerja yang lebih baik
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara	keterlambatan informasi yang mengakibatkan layanan kepegawaian terhambat

	Administrasi Kepegawaian	sumber daya manusia	tepat waktu dan akurat	
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	aturan belum sepenuhnya dipahami
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kota Tomohon yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pemutakhiran data pegawai perlu dilakukan secara berkala
		Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	pejabat perbendaharaan terlambat dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Satker terlambat dalam penyampaian pelaporan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	penyelesaian masalah pengelolaan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Satker terlambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
		Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara

		peraturan dan perundangan		
		yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	Pelaporan Barang Milik Negara berbasis Aplikasi
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	Pimpinan dan Staf belum memahami aturan tentang kearsipan
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab. Kepl. Sangihe	Persentase saranan transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Tomohon yang dapat dipenuhi	peningkatan sarana dan prasarana
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Tidak ada permasalahan karena penggunaan ruangan rapat disesuaikan dengan jadwal kegiatan rapat
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Tomohon	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon yang dapat ditanggulangi	SDM yang ada belum dilatih untuk menanggulangi gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kota Tomohon yang tepat waktu	Pimpinan dan staf belum memahami tugas dan fungsi dalam satgas SPIP

		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota Tomohon	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Belum semua rekomendasi BPK dapat diselesaikan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tomohon	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tomohon	Masih terdapat beberapa hasil kegiatan yang belum dapat diukur dengan baik
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya kajian litbang, riset dan jurnal kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	KPU Kota Tomohon belum pernah melakukan kajian dalam bentuk riset dan jurnal kepemiluan
II. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait; uji publik kepada pemangku kepentingan	Belum terbangunnya sistem koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, sehubungan dengan uji publik sebuah produk hukum (Keputusan) di internal KPU Kota Tomohon
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Sistem pengelolaan produk hukum dan pendokumentasian masih ada ketergantungan pada format-format baku, karena kurangnya tenaga ahli pada bidangnya/analisis hukum.

			<p>Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP</p>	<p>Pertama, secara prosedural masih terkendala dengan fasilitas pendukung pengelolaan JDIH KPU Kota Tomohon sehingga berdampak pada pengelolaan JDIH KPU Kota Tomohon atau belum maksimal dapat dilaksanakan. kedua bahwa Pengunggahan produk hukum pada laman JDIH Kota Tomohon masih tergantung pada kepentingan belum menjadi kebutuhan, sehingga masih minimnya orang menyukai termasuk internal KPU.</p>
2	<p>Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</p>	<p>Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</p>	<p>Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum</p>	<p>Sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait sengketa masih kurang</p>
			<p>Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Adanya peningkatan regulasi Pemilu dan Pemilihan yang berupaya menutup celah hukum terjadinya sengketa dan indentifikasi masalah dan bantuan hukum pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan</p>

			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon	Persoalan yang paling dominan adalah masalah DPT, penggelembungan Suara atau perbedaan dalam penghitungan suara pada tingkat KPPS dan masalah pemberian upeti/Uang kepada pemilih yang kemudian dalam persidangan tidak terbukti dan yang terakhir adalah terkait mantan terpidana.
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Tomohon menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Peraturan KPU yang terlambat diterbitkan
			Persentase KPU Kota Tomohon memutakhirkan data wilayah/pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Data (DAK2) antara kemendagri dan disdukcapil kabupaten/kota tidak sinkron
			Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal	Badan Adhoc kurang memahami proses pelaksanaan tungsura
			Persentase KPU Kota Tomohon dalam menetapkan perolehan kursi dan menetapkan calon terpilih Pemilu 2024	Karena adanya perbedaan data perolehan suara yang dimiliki oleh calon dengan data KPU

		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tomohon dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Keterbatasan anggaran pada proses PAW
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Tidak semua operator memahami pengoperasian aplikasi
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Terhambatnya proses pelaporan dana kampanye, verifikasi parpol dan/atau syarat dukungan calon perseorangan
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	Perubahan kepengurusan partai politik
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Tomohon	Keterbatasan anggaran membentuk pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Tomohon
			Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Keterbatasan SDM di KPU Kota Tomohon mendigitalisasi RPP
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kota Tomohon	Keterbatasan anggaran dan adanya pandemi Covid-19 sehingga membatasi pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum di Kota Tomohon

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kota Tomohon	Perlunya dukungan anggaran melaksanakan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan di Kota Tomohon
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kota Tomohon	Perlunya dukungan anggaran melaksanakan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula di Kota Tomohon
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kota Tomohon	Perlunya dukungan anggaran melaksanakan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas di Kota Tomohon
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kab. Kepl. Sangihe	Perlunya dukungan anggaran melaksanakan pendidikan pemilih di daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah di Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Operator belum memahami tentang SOP PPID
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	Perlunya dukungan anggaran untuk menyajikan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan melalui media massa

			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kab. Kepl. Sangihe paling lambat 1 (satu) hari kerja	Perlunya bimbingan teknis dan dukungan fasilitas IT dalam menyampaikan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan melalui media publikasi KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Tomohon Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Keterbatasan SDM di KPU Kota Tomohon dalam menyampaikan informasi dan publikasi pada tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui media publikasi
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	perencanaan anggaran pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	perencanaan penyusunan pengadaan kebutuhan logistik harus cermat dan efisien

			Persentase Persentase KPU Kota Tomohon dalam mendistribusikan logistik	perlunya efisiensi waktu dalam perencanaan, pengelolaan
			Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	pendistribusian logistik
			Persentase Persentase KPU Kota Tomohon menginventarisir, mengelola dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	menginventarisir, mengelola dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan berdasarkan aturan dan retensi arsip
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	terlambat menyampaikan kebutuhan pengadaan logistik
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan Masa Pandemi Covid-19

6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kota Tomohon	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Masyarakat Kota Tomohon pasif dalam melaporkan adanya perubahan pada data kependudukannya
				Terbatasnya akses data kependudukan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil kepada KPU Kota Tomohon
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Ketersediaan sarana dan prasarana perangkat teknologi pendukung seperti laptop, komputer, proyektor, scanner dan jaringan internet akses cepat masih terbatas

			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Tomohon	Belum semua aplikasi KPU mampu dioperasikan oleh operator
--	--	--	---	---

Ditetapkan di Tomohon
Pada Tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM,



NOVIE T. RUNTUKAHU

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON TAHUN 2023

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	0	Adanya revisi rencana kerja dan anggaran pada KPU Kota Tomohon	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19	Internal	C	Beberapa kegiatan tidak terlaksana atau tidak maksimal dalam pelaksanaannya	Internal KPU	Memaksimalkan pencapaian target kinerja sesuai revisi rencana kerja dan anggaran yang sudah dilakukan		Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional

2	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Permasalahan	Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata	Internal	C	Kinerja monev di lingkungan KPU Kota Tomohon tidak mengalami peningkatan	Internal KPU	Meningkatkan kualitas SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon	Satgas SPIP belum memahami tupoksi yang ada	Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional
3	Persentase target kinerja KPU Kota Tomohon tercapai sesuai dengan perjanjian kerja	0	Tidak tercapainya target kinerja karena adanya refocusing anggaran	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Adanya perubahan rencana kerja dan anggaran akibat pandemi Covid-19	Internal	C	Pelayanan publik kurang maksimal	Internal dan Eksternal KPU	Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan yang sedang berjalan		Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional

4	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	Adanya refocusing anggaran seluruh Satker untuk percepatan penanganan Covid-19 sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) organisasi	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pimpinan dan pegawai masih beradaptasi terhadap pemahaman dan budaya kerja dalam reformasi birokrasi	Internal	C	Tidak tercapainya nilai target dengan predikat B untuk penilaian mandiri RB	Internal dan Eksternal KPU	Memahami dan melaksanakan regulasi terkait reformasi birokrasi dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Belum optimalnya kinerja pelayanan publik dan minimnya kualitas sumber daya aparatur	Risiko Kebijakan dan Kepatuhan
---	---	--	--	--	--	----------	---	---	----------------------------	---	--	--------------------------------

5	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Hasil monitoring dan evaluasi belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya	terlambatnya informasi layanan kepegawaian	Divisi SDM	pemantauan/koordinasi berkala dalam layanan kepegawaian	Internal	C	layanan kepegawaian terlambat sehingga KP dan KGB tertunda	Internal KPU	perlu pemantauan/koordinasi berkala	kurangnya pemantauan/koordinasi proses KP dan KGB	Risiko Operasional
6	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	Beberapa target kinerja tidak tercapai dengan adanya refocusing anggaran	penerapan disiplin pegawai diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pegawai	Divisi SDM	Pemilik resiko belum memaksimalkan program pemantauan berkala	Internal	C	Pegawai ASN dan PPNPN yang tersedia masih ada yang belum berkompeten	Internal KPU	perlu dibuat mekanisme pelatihan kompetensi untuk menunjang penerapan disiplin dan kinerja pegawai	dibuat mekanisme pemantauan penerapan disiplin dan kinerja pegawai	Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional

7	Persentase Pegawai Kota Tomohon yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pimpinan dan pegawai belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta belum memiliki pola pikir yang melayani masyarakat atau stakeholder dan pencapaian kinerja yang lebih baik	Pemutakhiran data pegawai secara berkala dapat menghasilkan data base pegawai yang akurat	Divisi SDM	masih belum maksimal dalam pemutakhiran data base kepegawai	Internal dan Eksternal	C	terjadinya perbedaan antara data fisik dan data base kepegawai an	Internal KPU dan Eksternal	Membuat daftar nominatif data pegawai	progres pemutakhiran data base pegawai belum maksimal	Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional
---	--	---	---	------------	---	------------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------------	---	---

8	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu	Beban kerja yang berat di masa pandemi covid-19	Divisi SDM	Rendahnya honor penyelenggara badan ad hoc	Internal	C	Tahapan pendaftaran badan ad hoc di perpanjang	Internal KPU	Bekerjasama dengan lembaga pendidikan (guru) untuk menjadi Penyelenggara Pemilu khususnya PPK, PPS dan KPPS		Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional
9	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggunggunaan penggunaan anggaran sesuai ketentuan	aturan belum sepenuhnya dipahami	format pelaporan pertanggungjawaban yang berubah-ubah (tidak baku)	Divisi KUL	keterlambatan waktu penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan	Internal	C	lamanya jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian pelaporan pertanggungjawaban	Internal KPU	membuat jadwal jangka waktu penyelesaian laporan pertanggungjawaban	kurangnya monitoring jadwal penyelesaian laporan pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional

10	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pemutakhiran data pegawai perlu dilakukan secara berkala	penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belum konsistensi dengan ketepatan waktu	Divisi KUL	satker tidak mematuhi jadwal yang telah ditentukan	Internal	C	laporan terlambat	Internal KPU dan Eksternal	mencantumkan batas waktu pelaporan	kurangnya pemantauan dalam penyusunan laporan keuangan	Risiko Operasional
11	Persentase permasalahan pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	0	identifikasi masalah belum maksimal	Divisi KUL	persamaan persepsi kegiatan belum maksimal	Internal	C	pengelolaan keuangan tidak maksimal	Internal KPU dan Eksternal	melakukan koordinasi persamaan persepsi kegiatan yang akan dilaksanakan	kurangnya koordinasi dalam pengelolaan keuangan	Risiko Operasional

12	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	pejabat perbendaharaan terlambat dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban	penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA belum tepat waktu	Divisi KUL	operator terlambat dalam melakukan penginputan	Internal	C	pelaporan laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu	Internal KPU	mengoptimalkan sistem informasi yang sudah ada	kurangnya monitoring atasan tentang batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban	Risiko Operasional
13	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Satker terlambat dalam penyampaian pelaporan	jumlah laporan pengelolaan Barang Milik Negara	Divisi KUL	penginventarisasian BMN belum maksimal	Internal	C	penginventarisasi barang tidak optimal	internal KPU	atasan mengingatkan pengelola barang untuk menginventarisasi setiap BMN yang ada	kurangnya monitoring atasan dalam penginventarisasi BMN	Risiko Operasional

14	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	penyelesaian masalah pengelolaan keuangan	penginputan data melalui aplikasi belum tepat waktu	Divisi KUL	operator terlambat dalam melakukan penginputan	Internal	C	pelaporan asset sering terlambat	Internal KPU	mengoptimalkan sistem informasi yang sudah ada	kurangnya monitoring atasan dalam pelaksanaan penginputan Barang Milik Negara di aplikasi	Risiko Operasional
15	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	Satker terlambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan	kurangnya pemahaman tentang pengelolaan kearsipan	Divisi KUL	pelaksanaannya belum berpacu pada aturan kearsipan	Internal	C	terlambat dalam pelaporan penghapusan/pemusnahan arsip	internal KPU	memahami aturan kearsipan mengenai arsip yang masih dan sudah tidak mempunyai nilai guna	kurangnya pemahaman tentang kearsipan	Risiko Operasional

16	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara	kurangnya pemantauan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Divisi KUL	pemilik resiko tidak memrogramkan pemantauan berkala pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Internal	C	pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas tidak tepat waktu	Internal KPU	pencantuman jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	kurangnya pemantauan jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Risiko Operasional
17	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Pelaporan Barang Milik Negara berbasis Aplikasi	kurang fasilitas dukungan layanan perkantoran	Divisi KUL	terbatasnya fasilitas perkantoran yang tersedia	Internal	C	pekerjaan yang dihasilkan optimal namun terlambat	Internal KPU	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada	memantau usulan anggaran pengadaaan fasilitas perkantoran	Risiko Operasional

18	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab. Kepl. Sangihe yang dapat dipenuhi	Pimpinan dan Staf belum memahami aturan tentang kearsipan	pemantauan pemeliharaan berkala gedung kantor	Divisi KUL	diprogramkan tapi tidak dilaksanakan pemantauan secara berkala	Internal	C	pemeliharaan kantor tidak dilaksanakan secara tepat waktu	Internal KPU	satker wajib memperhatikan kondisi keadaan kantor	kurangnya monitoring satker dalam melakukan pemeliharaan kondisi keadaan kantor	Risiko Operasional
19	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Penyesuaian penggunaan ruangan rapat dengan jadwal kegiatan	Divisi KUL	Tidak ada rapat yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang bersamaan	Internal	C	Ruang rapat dapat digunakan secara maksimal	Internal KPU	Penggunaan rapat disesuaikan dengan jadwal kegiatan semua divisi/sub bagian		Risiko Operasional

21	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon yang dapat ditanggulangi	dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai	Perlunya pelatihan penanggulangan gangguan keamanan kepada SDM khususnya petugas pengamanan/sekuriti	Divisi KUL	Belum ada kegiatan pelatihan petugas pengamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon	Internal	C	Dapat terjadi gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon	Internal KPU	Memaksimalkan tugas piket harian sesuai dengan SOP yang diberikan pimpinan, terutama dalam menjaga keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon		Risiko Operasional
22	Jumlah Laporan SPIP KPU Kota Tomohon yang tepat waktu	peningkatan sarana dan prasarana	Satgas SPIP belum memahami tupoksinya masing-masing	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Belum terbentuk pola kerja yang sesuai dengan SPIP	Internal	C	Keterlambatan dalam pelaporan kartu kendali SPIP	Internal KPU	Koordinasi yang masif antar anggota Satgas SPIP'		Risiko Operasional

23	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan karena penggunaan ruangan rapat disesuaikan dengan jadwal kegiatan rapat	Setoran TGR belum sepenuhnya disetor ke kas negara	KPU Kota Tomohon	Penyetoran/ Pelunasan TGR merupakan tanggung jawab dari masing-masing yang bersangkutan	Internal	C	Hasil temuan dalam LHP KPU Kota Tomohon oleh BPK akan termuat terus sampai ada pelunasan TGR	Internal KPU Kota Tomohon	Sekretaris membuat surat pemberitahuan dan penegasan perihal pelunasan TGR kepada masing-masing yang kena TGR	Data TGR akan terus tercatat sampai ada pelunasan secara keseluruhan dari Satker	Risiko Fraud, Risiko Legal dan Risiko Kepatuhan
24	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tomohon	SDM yang ada sudah dilatih untuk menanggulangi gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon	Rendahnya capaian kinerja kegiatan	KPU Kota Tomohon	Kurang cermat dalam menetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana target capaian	Internal	C	Tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan	Internal KPU	Melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala dan mencari strategi baru dalam pencapaian target selanjutnya	Beberapa kegiatan belum mencapai target kinerja	Risiko Kebijakan dan Risiko Kepatuhan

25	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	Pimpinan dan staf belum memahami tugas dan fungsi dalam satgas SPIP	Belum dilakukannya kegiatan riset dan jurnal kepemiluan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kegiatan sudah masuk dalam renstra tetapi belum ada alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan jurnal kepemiluan di KPU Kabupaten/ Kota yang diturunkan oleh KPU RI	Internal	C	Tidak ada kegiatan riset dan jurnal kepemiluan	Internal KPU	Melakukan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan kepemiluan	Belum ada evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan kepemiluan	Risiko Operasional
----	--	---	---	--	--	----------	---	--	--------------	---	--	--------------------

26	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait; uji publik kepada pemangku kepentingan	Masih terdapat beberapa hasil kegiatan yang belum dapat diukur dengan baik	Produk Hukum berupa Keputusan dapat menjamin kepastian Hukum dan dapat dipertanggungjawabkan	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengetahuan tentang urgensi sebuah produk hukum dalam setiap tahapan masih kurang dipahami	Internal	C	Terjadi kesalahan dalam pengambilan Keputusan dapat berakibat atau berdampak hukum pada setiap tahapan	Internal dan Eksternal KPU	Melakukan sosialisasi, Pelatihan/ Bimtek dan secara berkala menyusun DIM pada tiap tahapan	Risiko Kebijakan dan Risiko Legal
----	---	--	--	-----------------------------	--	----------	---	--	----------------------------	--	-----------------------------------

27	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	KPU Kota Tomohon belum pernah melakukan kajian dalam bentuk riset dan jurnal kepemilu an	Proses pembentukan sebuah produk hukum selalu didasarkan pada Regulasi, Referensi hukum dan Fakta hukum serta SOP	Divisi Hukum dan Pengawa san	Penyusunan Produk Hukum belum berjalan sesuai SOP	Internal	C	Keterlamba tan dalam pembuatan produk-produk hukum dan hasil sebuah Produk Hukum tidak sesuai dengan SOP	Internal dan Ekstern al KPU	Adanya saling koordinasi antar divisi/subb ag dalam pemenuha n tupoksi yang ada		Risiko Legal dan Risiko Operasion al
28	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	0	Dukungan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia menentuka n hasil yang maksimal	Divisi Hukum dan Pengawa san	Kurangnya dukungan Fasilitas dan Tenaga yang memiliki keahlian sesuai kompetensi nya	Internal	C	Keterlamba tan dalam proses penyajian produk hukum	Internal dan Ekstern al KPU	Dilaksanak annya sosialisasi dan pelatihan peningkata n SDM di lingkungan KPU Kota Tomohon		Risiko Legal dan Risiko Operasion al

29	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Belum terbangunnya sistem koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait, sehubungan dengan uji publik sebuah produk hukum (Keputusan) di internal KPU Kota Tomohon	Menurunnya jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Divisi Hukum dan Pengawasan	KPU Kota Tomohon selalu mengikuti tahapan sesuai regulasi yang ada	Internal	C	Sengketa hukum bisa diminimalisir	Internal dan Eksternal KPU	Regulasi atau produk-produk hukum tentang Pemilu dan Pemilihan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dampak atau kesalahan-kesalahan dapat terhindarkan.	Risiko Legal dan Risiko Operasional
----	---	--	--	-----------------------------	--	----------	---	-----------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------

30	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	Sistem pengelolaan produk hukum dan pendokumentasian masih ada ketergantungan pada format-format baku, karena kurangnya tenaga ahli pada bidangnya/analisis hukum.	Menurunnya jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Adanya pemahaman bersama terhadap regulasi pemilihan	Internal	C	Penurunan jumlah sengketa	Internal dan Eksternal KPU	Koordinasi antara KPU Kota Tomohon dan stakeholder	Risiko Legal dan Risiko Operasional
----	--	--	---	-----------------------------	--	----------	---	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------

31	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon	Pertama, secara prosedural masih terkendala dengan fasilitas pendukung pengelolaan JDIH KPU Kota Tomohon sehingga berdampak pada pengelolaan JDIH KPU Kota Tomohon atau belum maksimal dapat dilaksanakan. kedua bahwa Pengung	Setiap sengketa hukum selalu dimenangkan oleh KPU Kota Tomohon	Divisi Hukum dan Pengawasan	KPU Kota Tomohon selalu mengikuti tahapan sesuai regulasi yang ada	Internal	C	Sengketa hukum bisa diminimalisir	Internal KPU dan Eksternal	Tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan regulasi		Risiko Legal dan Risiko Operasional
----	---	--	--	-----------------------------	--	----------	---	-----------------------------------	----------------------------	---	--	-------------------------------------

32	Persentase KPU Kota Tomohon menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Keterlambatan penetapan Jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Mengakibatkan keterlambatan penyusunan jadwal tahapan dan juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Keterbatasan waktu dalam penyusunan juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Internal	C	Juknis terlambat diterbitkan	Internal KPU dan Eksternal	Tetap mengikuti jadwal dan tahapan yang ada	Risiko Operasional
----	---	---	---	-------------------------------	---	----------	---	------------------------------	----------------------------	---	--------------------

33	Persentase KPU Kota Tomohon memutakhirkan data wilayah/pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Adanya peningkatan regulasi Pemilu dan Pemilihan yang berupaya menutup celah hukum terjadinya sengketa dan identifikasi masalah dan bantuan hukum pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan	Mempengaruhi proses pemetaan daerah pemilihan	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Data disdukcapi di Kab/Kota tidak terupdate dengan data kemendagri	Eksternal	UC	Mempengaruhi proses penetapan daerah pemilihan	Internal KPU dan Eksternal	Perlu adanya sinkronisasi data (DAK2) antara kemendagri dan disdukcapi kabupaten/kota	Risiko Operasional
----	--	--	---	-------------------------------	--	-----------	----	--	----------------------------	---	--------------------

34	<p>Persentase Kota Tomohon melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal</p>	<p>Persoalan yang paling dominan adalah masalah DPT, penggelembungan Suara atau perbedaan dalam penghitungan suara pada tingkat KPPS dan masalah pemberian upeti/Uang kepada pemilih yang kemudian dalam</p>	<p>kurangnya waktu/jadwal pelaksanaan bimtek kepada badan adhoc</p>	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p>	<p>Waktu pelaksanaan bimtek pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara harusnya dilaksanakan lebih awal</p>	<p>Internal</p>	<p>C</p>	<p>Beberapa badan adhoc salah dalam pengisian formulir</p>	<p>Internal KPU dan Eksternal</p>	<p>Melakukan monitoring langsung pada proses tungsura</p>	<p>risiko Operasional</p>
----	--	--	---	--------------------------------------	---	-----------------	----------	--	-----------------------------------	---	---------------------------

35	Persentase KPU Kota Tomohon dalam menetapkan perolehan kursi dan menetapkan calon terpilih Pemilu 2024	Peraturan KPU yang terlambat diterbitkan	mempengaruhi proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Data yang dimiliki oleh calon adalah data yang belum diperbaiki pada saat pelaksanaan rekapitulasi	Internal	C	Terjadinya PHPU sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih	Internal KPU dan Eksternal	Melaksanakan tahapan penyelenggaraan sesuai dengan aturan yang berlaku		Risiko Operasional
36	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tomohon dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Data (DAK2) antara kemendagri dan disdukcapil kabupaten/kota tidak sinkron	Keterlambatan proses PAW	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Tidak tersedianya anggaran pada proses PAW	Internal	C	Penyampaian hasil proses PAW ke KPU Provinsi hanya melalui jasa pengiriman yang sebaiknya disampaikan langsung oleh divisi teknis/sub	Internal KPU	Proses PAW tetap dilaksanakan dengan keterbatasan waktu dan anggaran		Risiko Operasional

								bagian teknis				
37	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Badan Adhoc kurang memahami proses pelaksanaan tungsur	Operator sipol dan silon belum memahami penggunaan aplikasi	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Operator tidak serius mengikuti bimtek	Eksternal	C	Pengisian data pada aplikasi mengalami keterlambatan	Internal KPU dan Eksternal	Koordinasi dengan calon peserta pemilu		Risiko Operasional

38	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Karena adanya perbedaan data perolehan suara yang dimiliki oleh calon dengan data KPU	mempengaruhi waktu tahapan	Divisi Teknis Penyelenggaraan	SOP atau juknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Parpol dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan terlambat diterbitkan	Internal KPU	C	Sosialisasi juknis pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Parpol dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan terlambat dilaksanakan	Internal KPU dan Eksternal	Koordinasi bersama Partai Politik dan Calon Perseorangan	Risiko Operasional
----	--	---	----------------------------	-------------------------------	--	--------------	---	--	----------------------------	--	--------------------

39	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	Keterbatasan anggaran pada proses PAW	Partai politik tidak menyampaikan perubahan kepengurusan parpol	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kurangnya koordinasi	Eksternal	UC	KPU kesulitan dalam melaksanakan koordinasi	Internal KPU	Meningkatkan koordinasi		Risiko Operasional
40	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Tomohon	Tidak semua operator memahami pengoperasian aplikasi	Perlu adanya tambahan anggaran	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Tidak tersedianya anggaran membentuk pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Tomohon	Internal	C	Belum terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Tomohon	Internal KPU dan Eksternal	Memaksimalkan penggunaan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih		Risiko Operasional

41	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Terhambatnya proses pelaporan dana kampanye, verifikasi parpol dan/atau syarat dukungan calon perseorangan	Perlu adanya pengembangan RPP dan Pelatihan SDM	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	SDM di KPU Kota Tomohon sangat minim/kurang	Internal	C	Pelaksanaan Digitalisasi RPP masih minim	Internal KPU dan Eksternal	Melaksanakan Evaluasi dan Pemahaman tentang digitalisasi RPP		Risiko Operasional
42	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kota Tomohon	Perubahan kepengurusan partai politik	Tambahan anggaran dalam pelaksanaan Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Karena adanya pandemi Covid-19 sehingga jumlah peserta sosialisasi, pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi dibatasi	Internal	C	Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi belum dilaksanakan	Internal KPU dan Eksternal	Sosialisasi secara masif		Risiko Operasional

43	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kota Tomohon	Keterbatasan anggaran membentuk pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Tomohon	Minimnya anggaran kegiatan pendidikan pemilih dan demokrasi untuk pemilih perempuan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Anggaran yang tersedia tidak merata ke seluruh wilayah/kecamatan	Internal	C	Tingkat partisipasi pemilih perempuan masih rendah	Internal KPU dan Eksternal	Melibatkan pemilih perempuan dalam kegiatan sosialisasi		Risiko Operasional
44	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kota Tomohon	Keterbatasan SDM di KPU Kota Tomohon mendigitalisasi RPP	Ketersediaan anggaran yang sangat minim	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	kurangnya tingkat partisipasi pemilih pemula	Internal	C	Adanya Pemilih pemula yang belum memahami proses kepemiluan dan demokrasi	Internal KPU dan Eksternal	Sosialisasi Goes To School		Risiko Operasional

45	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kota Tomohon	Keterbatasan anggaran dan adanya pandemi Covid-19 sehingga membatasi pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum di Kota Tomohon	Fasilitas penunjang bagi pemilih disabilitas perlu ditingkatkan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Anggaran yang tersedia belum maksimal memfasilitasi pemilih disabilitas	Internal	C	Sebagian pemilih disabilitas tidak dapat memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya	Internal KPU dan Eksternal	Sebagai KPPS melayani pemilih disabilitas dirumah masing-masing		Risiko Operasional
----	--	--	---	--	---	----------	---	--	----------------------------	---	--	--------------------

46	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kota Tomohon	Perlunya dukungan anggaran melaksanakan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilihan perempuan di Kota Tomohon	Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Belum tersedia anggaran DP3 di KPU Kota Tomohon	Internal	C	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada lokus DP3 belum terlaksana	Internal KPU dan Eksternal	KPU hanya melakukan sosialisasi program DP3 di kantor	Risiko Operasional
----	---	---	--	--	---	----------	---	--	----------------------------	---	--------------------

47	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Perlunya dukungan anggaran melaksanakan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula di Kota Tomohon	Perlunya bimbingan teknis kepada operator PPID	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Operator belum diberikan bimbingan teknis tentang SOP PPID	Internal	C	Pelayanan PPID belum maksimal	Internal KPU dan Eksternal	PPID tetap melayani permohonan informasi baik secara langsung maupun secara online		Risiko Operasional
----	---	--	--	--	--	----------	---	-------------------------------	----------------------------	--	--	--------------------

48	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	Perlunya dukungan anggaran melaksanakakan pendidikan pemilih dan demokrasi untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggaran untuk publikasi melalui media massa	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Tidak tersedianya anggaran untuk publikasi melalui media massa	Internal	C	Tidak ada Informasi dan publikasi melalui media massa	Internal KPU dan Eksternal	Menyajikan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan melalui media massa dengan pendekatan internal bersama rekan-rekan media/warawan	Risiko Operasional
----	--	---	--	--	--	----------	---	---	----------------------------	--	--------------------

49	<p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Tomohon paling lambat 1 (satu) hari kerja</p>	<p>Perlunya dukungan anggaran melaksanakannya akan pendidikan pemilih di daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah di Kota Tomohon</p>	<p>Bimbingan teknis kepada operator IT dan perlunya dukungan anggaran</p>	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat</p>	<p>SDM yang ada di KPU Kota Tomohon belum memahami pengoperasian IT</p>	Internal	C	<p>Informasi dan publikasi tahapan mengalami keterlambatan</p>	Internal KPU dan Eksternal	<p>Peningkatan kapasitas SDM dalam pengoperasian IT</p>		<p>Risiko Operasional</p>
----	---	--	---	---	---	----------	---	--	----------------------------	---	--	---------------------------

50	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Operator belum memahami tentang SOP PPID	Perlunya penambahan SDM	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Penyampaian informasi tahapan Pemilu/Pemilihan terlambat dipublikasikan	Internal KPU dan Eksternal	Informasi dan Publikasi disampaikan melalui akun media sosial dan website KPU Kota Tomohon		Risiko Operasional
51	Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Perlunya dukungan anggaran untuk menyajikan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan melalui media massa	kurangnya pencermatan perencanaan anggaran pemenuhan logistik dalam Pemilu/Pemilihan	Divisi KUL	tidak memprogramkan pencermatan penyusunan anggaran pemenuhan logistik Pemilu/Pemilihan	Internal	C	kekurangan atau keterlambatan dalam pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan	Internal KPU	pencantuman program pencermatan berkala penyusunan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	kurangnya pencermatan penyusunan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Risiko Operasional

52	Persentase Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Perlunya bimbingan teknis dan dukungan fasilitas IT dalam menyampaikan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan melalui media publikasi KPU Kota Tomohon	kurangnya pemantauan penyusunan pengadaan kebutuhan logistik	Divisi KUL	terjadinya kekeliruan dalam penyusunan jumlah kebutuhan pengadaan logistik	Internal	C	penyusunan kebutuhan pengadaan logistik tidak tepat jumlah	Internal dan Eksternal KPU	melakukan rapat koordinasi persamaan persepsi dalam penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	kurangnya rapat koordinasi dalam penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	Risiko Operasional
----	---	--	--	------------	--	----------	---	--	----------------------------	---	--	--------------------

53	Persentase Persentase KPU Kota Tomohon dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Keterbatasan SDM di KPU Kota Tomohon dalam menyampaikan informasi dan publikasi pada tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui media publikasi	kurangnya pemantauan progress pendistribusian logistik	Divisi KUL	adanya logistik yang tidak tepat jumlah	internal dan eksternal	C	terjadinya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan	Internal dan Eksternal KPU	melakukan pemantauan dalam pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	kurang pemantauan pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	Risiko Operasional
----	---	--	--	------------	---	------------------------	---	---	----------------------------	--	---	--------------------

54	Persentase Persentase KPU Kota Tomohon menginventarisir, mengelola dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	perencanaan anggaran pemenuhan kebutuhan logistik	kurangnya pemahaman mengenai aturan tata cara menginventaris, mengelola dan memelihara logistik	Divisi KUL	terlambatnya dalam pencarian arsip logistik Pemilu/Pemilihan	internal dan eksternal	C	informasi yang dihasilkan optimal namun terlambat	Internal KPU dan Eksternal	melakukan monitoring inventerisasi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip berdasarkan aturan	kurangnya monitoring inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip	Risiko Operasional
55	Persentase penyediaan logistik Pemilu	perencanaan penyusunan pengadaan kebutuhan logistik harus cermat dan efisien	kurangnya progress pemantauan kebutuhan pengadaan logistik	Divisi KUL	Satker tidak memprogramkan pemantauan berkala penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	internal	C	penyediaan logistik terlambat	Internal KPU	melakukan pemantauan berkala dalam penyediaan logistik	pemantauan berkala dalam penyediaan logistik	Risiko Operasional

56	Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	perlunya efisiensi waktu dalam perencanaan, pengelolaan pendistribusian logistik	Pelaksanaan tahapan kepemiluan dalam masa pandemi	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Tahapan harus dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ada	Internal	C	Pemungutan dan Penetapan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid-19	Internal KPU dan Eksternal	Sosialisasi Pemungutan dan Penetapan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid-19		Risiko Operasional
57	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	menginventarisir, mengelola dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan berdasarkan aturan dan retensi arsip	Meningkatkan kesadaran semua pihak (masyarakat, lembaga terkait dan pemerintah) akan pentingnya tertib Administrasi Kependudukan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kesadaran masyarakat Kota Tomohon masih kurang dalam melaporkan data kependudukan, khususnya dalam hal pindah domisili (pindah masuk/keluar)	Eksternal	UC	Data pemilih yang dimutakhirkan belum sepenuhnya akurat	Internal dan Eksternal KPU	KPU Kota Tomohon melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi terkait/stakeholder		Risiko Legal dan Risiko Reputasi

(Adminduk
).

	terlambat menyampaikan kebutuhan pengadaan logistik	KPU Kota Tomohon memiliki akses terbatas pada data kependudukan Dinas Dukcapil	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan data kependudukan	Eksternal	C	Terdapat perbedaan data penduduk/pemilih antara data yang telah di update oleh KPU Kota Tomohon berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat dengan data yang berasal dari Dinas Dukcapil Kota Tomohon	Internal dan Eksternal KPU	KPU Kota Tomohon melakukan koordinasi secara berkala dengan Dinas Dukcapil		Risiko Kepatuhan dan Risiko Legal
--	---	--	--	--	-----------	---	--	----------------------------	--	--	-----------------------------------

58	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan Masa Pandemi Covid-19	Perlunya dukungan sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem informasi yang aman, handal dan lancar	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi pendukung	Internal	C	Terhambatnya penyediaan informasi yang up to date	Internal dan Eksternal KPU	Memaksimalkan penggunaan perangkat teknologi yang ada saat ini		Risiko Operasional
59	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Tomohon	Masyarakat Kota Tomohon pasif dalam melaporkan adanya perubahan pada data kependudukannya	Dibutuhkan SDM yang kompeten dalam mengelola aplikasi KPU	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kurangnya SDM yang kompeten dalam mengelola aplikasi KPU	Internal	C	Upload data dalam aplikasi terhambat atau kurang maksimal	Internal KPU	Pemberian pelatihan peningkatan kapasitas SDM secara rutin setiap minggu bagi seluruh tenaga ASN dan honorer khususnya para operator yang		Risiko Operasional

									mengelola aplikasi KPU		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--

Ditetapkan di Tomohon
Pada Tanggal 13 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM,



NOVIE T. RUNTUKAHU

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON TAHUN 2023

PETA RESIKO

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 x 7	9
1	Satgas SPIP belum memahami tupoksi yang ada	Sedang/Moderat	3	Belum maksimalnya pengawasan internal oleh Satgas SPIP	Sedang	3	9	ORANGE
2	Belum optimalnya kinerja pelayanan publik dan minimnya kualitas sumber daya aparatur	Sedang/Moderat	3	Belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi serta lemahnya implementasi kebijakan	Sedang	3	9	ORANGE
3	kurangnya pemantauan/koordinasi proses KP dan KGB	Rendah	1	Program koordinasi tidak terlaksana	rendah	1	1	BIRU
4	dibuat mekanisme pemantauan penerapan disiplin dan kinerja pegawai	Sedang/Moderat	3	diprogramkan tapi tidak terlaksana	Sedang	3	9	ORANGE

5	progress pemutakhiran data base pegawai belum maksimal	Sedang/Moderat	3	diprogramkan tapi belum terlaksana	sedang	3	9	ORANGE
6	kurangnya monitoring jadwal penyelesaian laporan pertanggungjawaban	Sedang/Moderat	3	monitoring jadwal pelaksanaan	sedang	3	9	ORANGE
7	kurangnya pemantauan dalam penyusunan laporan keuangan	Rendah	1	diprogramkan untuk dilakukan pemantauan	rendah	1	1	BIRU
8	kurangnya koordinasi dalam pengelolaan keuangan	Rendah	1	dilaksanakan koordinasi	rendah	1	1	BIRU
9	kurangnya monitoring atasan tentang batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban	Rendah	1	dilaksanakan monitoring	rendah	1	1	BIRU
10	kurangnya monitoring atasan dalam penginventarisasi BMN	Rendah	1	diprogramkan untuk dilakukan monitoring	rendah	1	1	BIRU
11	kurangnya monitoring atasan dalam pelaksanaan penginputan Barang Milik Negara di aplikasi	Rendah	1	monitoring dilaksanakan setiap jadwal penginputan	rendah	1	1	BIRU
12	kurangnya pemahaman tentang kearsipan	Kecil	1	tidak diprogramkan kegiatan monitoring pengelolaan kearsipan	kecil	1	1	BIRU
13	kurangnya pemantauan jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Sedang/Moderat	3	tidak diprogramkan jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	sedang	3	9	ORANGE
14	memantau usulan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran	Sedang/Moderat	3	diprogramkan tapi tidak terlaksana	sedang	3	9	ORANGE
15	kurangnya monitoring satker dalam melakukan pemeliharaan kondisi keadaan kantor	Kecil	1	monitoring dilaksanakan secara berkala	kecil	1	1	BIRU

16	Data TGR akan terus tercatat sampai ada pelunasan secara keseluruhan dari Satker	Sedang/Moderat	3	Temuan TGR tidak dapat dihapuskan sampai adanya pelunasan dari pihak masing-masing yang terkait	Sedang	3	9	ORANGE
17	Beberapa kegiatan belum mencapai target kinerja	Besar	4	Terbatasnya anggaran pada beberapa kegiatan	Besar	4	16	MERAH
18	Belum ada evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan pemilihan	Sedang/Moderat	3	Tidak teralokasinya anggaran untuk kegiatan evaluasi	Sedang	3	9	ORANGE
19	kurangnya pemecamatan penyusunan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Sedang/Moderat	3	tidak diprogramkan pemecamatan secara berkala atau diprogramkan tapi tidak dilaksanakan	sedang	3	9	ORANGE
20	kurangnya rapat koordinasi dalam penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	Besar	4	diprogramkan tapi rapat koordinasi tidak dilaksanakan	besar	4	16	MERAH
21	kurang pemantauan pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	Besar	4	pemantauan diprogramkan tetapi tidak dilaksanakan	besar	4	16	MERAH
22	kurangnya monitoring inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip	Kecil	1	monitoing inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip tidak dilaksanakan	kecil	1	1	BIRU
23	pemantauan berkala dalam penyediaan logistik	Sedang/Moderat	3	pemantauan berkala penyediaan logistik	sedang	3	9	ORANGE

Ditetapkan di Tomohon
Pada Tanggal 13 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM,



NOVIE T. RUNTUKAHU

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON TAHUN 2023

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Satgas SPIP belum memahami tupoksi yang ada	ORANGE		ORANGE	Kualitas SPIP masih rendah	95%
2	Belum optimalnya kinerja pelayanan publik dan minimnya kualitas sumber daya aparatur	ORANGE		ORANGE	In-efisiensi pelayanan publik serta tidak jelasnya waktu penyelesaian	95%
3	kurangnya pemantauan/koordinasi proses KP dan KGB	BIRU		BIRU	pemantauan/koordinasi berkala dalam layanan kepegawaian KP dan KGB	90%
4	dibuat mekanisme pemantauan penerapan disiplin dan kinerja pegawai	ORANGE		ORANGE	Persentase pemantauan penerapan disiplin dan kinerja pegawai	90%
5	progress pemutakhiran data base pegawai belum maksimal	ORANGE		ORANGE	progress pemutakhiran data base kepegawaian	90%
6	kurangnya monitoring jadwal penyelesaian laporan pertanggungjawaban	ORANGE		ORANGE	melakukan monitoring jadwal penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan	90%
7	kurangnya pemantauan dalam penyusunan laporan keuangan	BIRU		BIRU	prosentase pemantauan berkala dalam penyusunan Laporan keuangan	90%

8	kurangnya koordinasi dalam pengelolaan keuangan	BIRU	BIRU	intensitas rapat koordinasi berkala dalam pengelolaan keuangan	90%
9	kurangnya monitoring atasan tentang batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban	BIRU	BIRU	prosentase monitoring secara berkala batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban	90%
10	kurangnya monitoring atasan dalam penginventarisasi BMN	BIRU	BIRU	intensitas rapat dan monitoring berkala dalam penginventasian BMN	90%
11	kurangnya monitoring atasan dalam pelaksanaan penginputan Barang Milik Negara di aplikasi	BIRU	BIRU	intensitas monitoring secara berkala dalam pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara di aplikasi	90%
12	kurangnya pemahaman tentang kearsipan	BIRU	BIRU	memprogramkan kegiatan tata cara pengelolaan kearsipan	90%
13	kurangnya pemantauan jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	ORANGE	ORANGE	pemantauan berkala pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	90%
14	memantau usulan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran	ORANGE	ORANGE	persentase pemantauan berkala usulan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran	90%
15	kurangnya monitoring satker dalam melakukan pemeliharaan kondisi keadaan kantor	BIRU	BIRU	monitoring berkala pemeliharaan gedung dan gudang	90%
16	Data TGR akan terus tercatat sampai ada pelunasan secara keseluruhan dari Satker	ORANGE	ORANGE	Data LHP BPK	75%
17	Beberapa kegiatan belum mencapai target kinerja	MERAH	MERAH	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker rendah	75%
18	Belum ada evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan kepemiluan	ORANGE	ORANGE	Permasalahan kepemiluan yang berulang-ulang	80%
19	kurangnya pencermatan penyusunan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	ORANGE	ORANGE	melakukan pencermatan berkala penyusunan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	90%
20	kurangnya rapat koordinasi dalam penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	MERAH	MERAH	rapat koordinasi berkala penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	75%

21	kurang pemantauan pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	MERAH	MERAH	melakukan pemantauan berkala pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	75%
22	kurangnya monitoring inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip	BIRU	BIRU	monitoring berkala inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip	90%
23	pemantauan berkala dalam penyediaan logistik	ORANGE	ORANGE	melakukan pemantauan berkala dalam penyediaan logistik	80%

Ditetapkan di Tomohon
 Pada Tanggal 13 April 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
 Hukum dan SDM,



NOVIE T. RUNTUKAHU

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON TAHUN 2023

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kualitas SPIP masih rendah	95%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Koordinasi internal secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi	12 Laporan	Bulanan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
2	In-efisiensi pelayanan publik serta tidak jelasnya waktu penyelesaian	95%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Perlunya pemahaman SOP tentang pelayanan publik	Laporan hasil evaluasi kegiatan	1 Laporan	Tahunan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	

3	pemantauan/koordinasi berkala dalam layanan kepegawaian KP dan KGB	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	melakukan koordinasi berkala dalam pelaksanaan layanan kepegawaian	Laporan hasil koordinasi	1 Laporan	Tahunan	Divisi SDM	
4	Persentase pemantauan penerapan disiplin dan kinerja pegawai	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Pemantauan berkala dalam penerapan disiplin dan kinerja pegawai	Laporan hasil pemantauan	1 Laporan	Tahunan	Divisi SDM	
5	progress pemutakhiran data base kepegawaian	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	dilakukan updating secara berkala pemutakhiran data base kepegawaian	Laporan hasil pemutakhiran data base kepegawaian	1 Laporan	Tahunan	Divisi SDM	
6	melakukan monitoring jadwal penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	membuat jadwal jangka waktu penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan hasil monitong penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
7	prosentase pemantauan berkala dalam penyusunan Laporan keuangan	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	pemantauan berkala dalam penyusunan laporan keuangan	laporan hasil pemantauan	12 Laporan	Bulanan	Divisi KUL	

8	intensitas rapat koordinasi berkala dalam pengelolaan keuangan	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	rapat koordinasi secara berkala dalam pengelolaan keuangan	laporan hasil koordinasi	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
9	prosentase monitoring secara berkala batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	melakukan monitoring secara berkala batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan hasil monitoring	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
10	intensitas rapat dan monitoring berkala dalam penginventasian BMN	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	melakukan rapat dan monitoring secara berkala dalam penginventarisasian BMN	laporan hasil monitoring	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
11	intensitas monitoring secara berkala dalam pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara di aplikasi	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Melakukan monitoring secara berkala dalam pelaksanaan pelaporan BMN di aplikasi	laporan hasil monitoring	2 Laporan	Semester	Divisi KUL	
12	memprogramkan kegiatan tata cara pengelolaan kearsipan	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	menjadwalkan program kegiatan pengelolaan kearsipan	laporan hasil pemantauan kegiatan pengelolaan kearsipan	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	

13	pemantauan berkala pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	pencantuman jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	laporan hasil pemantauan	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
14	persentase pemantauan berkala usulan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	pemantauan berkala progress usulan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran	Laporan hasil pemantauan	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
15	monitoring berkala pemeliharaan gedung dan gudang	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	melakukan monitoring berkala pemeliharaan gedung dan gudang	laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan gudang secara berkala	12 Laporan	Bulanan	Divisi KUL	
16	Data LHP BPK	75%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Melakukan cicilan setoran TGR	Bukti setoran TGR	1 Laporan	Tahunan	Ketua KPU Kab. Kepl. Sangihe	
17	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker rendah	75%	Tindakan segera untuk mengelola risiko (Unacceptable)	Berkoordinasi dengan semua Ketua Divisi, Sekretaris dan Kasubbag dalam membuat sasaran atas kinerja yang ingin dicapai	Laporan Kinerja (LKj)	1 Laporan	Tahunan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	

18	Permasalahan kepemiluan yang berulang-ulang	80%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Evaluasi dan monitoring tahapan kepemiluan	Laporan Tahapan	1 Laporan	Setelah pelaksanaan tahapan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
19	melakukan pencermatan berkala penyusunan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	90%	mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	pemantau berkala pencermatan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	laporan hasil kegiatan pencermatan	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
20	rapat koordinasi berkala penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	75%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	melakukan rapat koordinasi secara berkala penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	laporan hasil rapat berkala	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
21	melakukan pemantauan berkala pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	75%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	pemantauan berkala pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	laporan hasil pemantauan pengelolaan logistik	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
22	monitoring berkala inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	monitoring berkala inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan	laporan hasil monitoring	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	

23	melakukan pemantauan berkala dalam penyediaan logistik	80%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	pemantauan berkala penyediaan logistik	Laporan hasil pemantauan penyediaan logistik	1 Laporan	Tahunan	Divisi KUL	
----	--	-----	--	--	--	-----------	---------	------------	--

Ditetapkan di Tomohon
 Pada Tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
 Hukum dan SDM,



NOVIE T. RINTUKAHU

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TOMOHON TAHUN 2023

PEMANTAUAN RISIKO

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$\frac{6=(5/4)}{x100}$	7	8	9	$\frac{10=(9/8)}{x100}$	11	12
1	Koordinasi internal secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi	12 Laporan	12 Laporan	100 %	terlambat dalam melakukan pelaporan	90%	100 %	90%		
2	Perlunya pemahaman SOP tentang pelayanan publik	Laporan hasil evaluasi kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Pelayanan publik belum maksimal	80%	80%	64%		
3	melakukan koordinasi berkala dalam pelaksanaan layanan kepegawaian	Laporan hasil koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	100 %	terlambat atau tertunda KP dan KGB	90%	100 %	90%		

4	Pemantauan berkala dalam penerapan disiplin dan kinerja pegawai	Laporan hasil pemantauan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	penerapan disiplin dan kinerja pegawai belum maksimal	90%	100 %	90%		
5	dilakukan updating secara berkala pemutakhiran data base kepegawaian	Laporan hasil pemutakhiran data base kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100 %	pemutakhiran data base pegawai	90%	100 %	90%		
6	membuat jadwal jangka waktu penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan hasil monitong penyelesaian laporan pertanggungjawab an keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	menjadwalkan jangka waktu penyelesaian laporan pertanggungjawab an	90%	100 %	90%		
7	pemantauan berkala dalam penyusunan laporan keuangan	laporan hasil pemantauan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	keterlambatan dalam pelaporan keuangan	90%	100 %	90%		
8	rapat koordinasi secara berkala dalam pengelolaan keuangan	laporan hasil koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	100 %	pengelolaan keuangan belum maksimal	90%	100 %	90%		
9	melakukan monitoring secara berkala batas waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan hasil monitoring	1 Laporan	1 Laporan	100 %	keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawab an	90%	100 %	90%		
10	melakukan rapat dan monitoring secara berkala dalam	laporan hasil monitoring	1 Laporan	1 Laporan	100 %	belum terinventarisir setiap BMN	90%	100 %	90%		

	penginventarisasian BMN										
11	Melakukan monitoring secara berkala dalam pelaksanaan pelaporan BMN di aplikasi	laporan hasil monitoring	2 Laporan	2 Laporan	100 %	keterlambatan dalam penginputan BMN di aplikasi	90%	100 %	90%		
12	menjadwalkan program kegiatan pengelolaan kearsipan	laporan hasil pemantauan kegiatan pengelolaan kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	memahami aturan kearsipan mengenai arsip aktif dan inaktif	90%	100 %	90%		
13	pencantuman jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	laporan hasil pemantauan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	90%	100 %	90%		
14	pemantauan berkala progress usulan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran	Laporan hasil pemantauan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	progress usulan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran	90%	100 %	90%		
15	melakukan monitoring berkala pemeliharaan gedung dan gudang	laporan kegiatan pemeliharaan gedung dan gudang secara berkala	12 Laporan	12 Laporan	100 %	kegiatan pemeliharaan gedung dan gudang	90%	100 %	90%		
16	Melakukan cicilan setoran TGR	Bukti setoran TGR	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Penyetoran dilakukan sampai TGR lunas	75%	80%	60%		

17	Berkoordinasi dengan semua Ketua Divisi, Sekretaris dan Kasubbag dalam membuat sasaran atas kinerja yang ingin dicapai	Laporan Kinerja (LKj)	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Berkurangnya nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker	75%	100 %	75%		
18	Evaluasi dan monitoring tahapan kepemiluan	Laporan Tahapan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Tahapan dilaksanakan belum maksimal	80%	75%	60%		
19	pemantau berkala pencermatan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	laporan hasil kegiatan pencermatan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	pencermatan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	90%	100 %	90%		
20	melakukan rapat koordinasi secara berkala penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	laporan hasil rapat berkala	1 Laporan	1 Laporan	100 %	rapat koordinasi berkala penyusunan kebutuhan pengadaan logistik	75%	100 %	75%		
21	pemantauan berkala pengelolaan logistik (perencanaan, pengepakan sampai pendistribusian)	laporan hasil pemantauan pengelolaan logistik	1 Laporan	1 Laporan	100 %	pemantauan berkala pengelolaan logistik	75%	100 %	75%		
22	monitoring berkala inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan	laporan hasil monitoring	1 Laporan	1 Laporan	100 %	monitoring berkala inventarisasi, mengelola dan memelihara arsip	90%	100 %	90%		

23	pemantauan berkala penyediaan logistik	Laporan hasil pemantauan penyediaan logistik	1 Laporan	1 Laporan	100 %	pemantauan berkala penyediaan logistik	80%	100 %	80%		
----	--	--	-----------	-----------	-------	--	-----	-------	-----	--	--

Ditetapkan di Tomohon
 Pada Tanggal 13 April 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON

ttd.

HARRYATO Y. S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON Kepala Sub Bagian
 Hukum dan SDM,

